



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1996/KSP.00/70-74/03/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Koordinasi Pelaksanaan Konsolidasi  
dan E-Audit Pengadaan Barang/Jasa  
(PBJ) di Pemerintah Daerah

24 Maret 2025

**Yth. Kepala Daerah (Daftar Terlampir)**

di

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Sehubungan resiko korupsi di sektor pengadaan barang/jasa (PBJ) yang masih tinggi di Pemerintah Daerah dan dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pelaksanaan konsolidasi PBJ pemerintah daerah dan RSUD yang difasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan KPK pada tanggal 6 Maret 2025 yang dilakukan secara *online*, beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk menjadi atensi serta ditindaklanjuti, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah agar mencatatkan di dalam sistem elektronik seluruh paket pada tahapan proses pemilihan penyedia PBJ;
2. Pemerintah Daerah agar melakukan konsolidasi PBJ untuk paket yang sejenis;
3. Pemerintah Daerah agar melakukan evaluasi besaran komposisi nilai PBJ dengan metode pengadaan swakelola dan metode pengadaan penunjukan langsung, pengadaan langsung serta pengecualian sehingga tidak terjadi celah tindak pidana korupsi;

4. Segera menerbitkan surat permintaan pendampingan teknis konsolidasi PBJ ke LKPP cq. Deputi Bidang Hukum & Penyelesaian Sanggah LKPP;
5. Segera menerbitkan surat permintaan penerbitan akun *e-audit* PBJ untuk pengawasan *e-purchasing* cq. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP;
6. Mengisi *dashboard monitoring* pelaksanaan konsolidasi PBJ secara berkala di tautan berikut: <https://bit.ly/PBJKonsolidasiTahun2025>;
7. Mengisi *dashsboard monitoring* penggunaan *e-audit* secara berkala di tautan berikut: [https://bit.ly/Monitoring\\_e-audit2025](https://bit.ly/Monitoring_e-audit2025).

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon Saudara untuk menugaskan pejabat terkait yang membidangi pelaksanaan PBJ pada pemerintah daerah dan Inspektorat untuk melaporkan tindak lanjut dari poin-poin atensi melalui *link* terkait sebelum 1 Juli 2025. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi *Person In Charge* (PIC) Wilayah Koordinasi masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan  
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,  
Komisi Pemberantasan Korupsi



*Dokumen ini ditandatangani secara digital*

Didik Agung Widjanarko

Tembusan:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
4. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Inspektur Komisi Pemberantasan Korupsi

**Lampiran**

Nomor : B/1996/KSP.00/70-74/03/2025

Tanggal : 24 Maret 2025

**Yth. Kepala Daerah di Provinsi Jawa Tengah**

1. Provinsi Jawa Tengah
2. Kota Magelang
3. Kota Pekalongan
4. Kota Salatiga
5. Kota Semarang
6. Kota Surakarta
7. Kota Tegal
8. Kabupaten Banjarnegara
9. Kabupaten Banyumas
10. Kabupaten Batang
11. Kabupaten Blora
12. Kabupaten Boyolali
13. Kabupaten Brebes
14. Kabupaten Cilacap
15. Kabupaten Demak
16. Kabupaten Grobogan
17. Kabupaten Jepara
18. Kabupaten Karanganyar
19. Kabupaten Kebumen
20. Kabupaten Kendal
21. Kabupaten Klaten
22. Kabupaten Kudus
23. Kabupaten Magelang
24. Kabupaten Pati
25. Kabupaten Pekalongan
26. Kabupaten Pemasang
27. Kabupaten Purbalingga
28. Kabupaten Purworejo
29. Kabupaten Rembang
30. Kabupaten Semarang
31. Kabupaten Sragen
32. Kabupaten Sukoharjo
33. Kabupaten Tegal

34. Kabupaten Temanggung
35. Kabupaten Wonogiri
36. Kabupaten Wonosobo

**Yth. Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta**

1. Daerah DI Yogyakarta
2. Kota Yogyakarta
3. Kabupaten Bantul
4. Kabupaten Gunungkidul
5. Kabupaten Kulon Progo
6. Kabupaten Sleman

**Yth. Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Timur**

1. Provinsi Jawa Timur
2. Kabupaten Pacitan
3. Kabupaten Ponorogo
4. Kabupaten Trenggalek
5. Kabupaten Tulungagung
6. Kabupaten Blitar
7. Kabupaten Kediri
8. Kabupaten Malang
9. Kabupaten Lumajang
10. Kabupaten Jember
11. Kabupaten Banyuwangi
12. Kabupaten Bondowoso
13. Kabupaten Situbondo
14. Kabupaten Probolinggo
15. Kabupaten Pasuruan
16. Kabupaten Sidoarjo
17. Kabupaten Mojokerto
18. Kabupaten Jombang
19. Kabupaten Nganjuk
20. Kabupaten Madiun
21. Kabupaten Magetan
22. Kabupaten Ngawi
23. Kabupaten Bojonegoro
24. Kabupaten Tuban
25. Kabupaten Lamongan

26. Kabupaten Gresik
27. Kabupaten Bangkalan
28. Kabupaten Sampang
29. Kabupaten Pamekasan
30. Kabupaten Sumenep
31. Kota Kediri
32. Kota Blitar
33. Kota Malang
34. Kota Probolinggo
35. Kota Pasuruan
36. Kota Mojokerto
37. Kota Madiun
38. Kota Surabaya
39. Kota Batu

**Yth. Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat**

1. Provinsi Kalimantan Barat
2. Kota Pontianak
3. Kota Singkawang
4. Kabupaten Sambas
5. Kabupaten Melawi
6. Kabupaten Kubu Raya
7. Kabupaten Ketapang
8. Kabupaten Sekadau
9. Kabupaten Bengkayang
10. Kabupaten Mempawah
11. Kabupaten Kayong Utara
12. Kabupaten Sanggau
13. Kabupaten Landak
14. Kabupaten Sintang
15. Kabupaten Kapuas Hulu

**Yth. Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan**

1. Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kota Banjarmasin
3. Kota Banjarbaru
4. Kabupaten Tabalong
5. Kabupaten Barito Kuala

6. Kabupaten Tanah Laut
7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Kabupaten Balangan
9. Kabupaten Hulu Sungai Utara
10. Kabupaten Kotabaru
11. Kabupaten Tapin
12. Kabupaten Tanah Bumbu
13. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
14. Kabupaten Banjar

**Yth. Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah**

1. Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kota Palangkaraya
3. Kabupaten Katingan
4. Kabupaten Pulang Pisau
5. Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Kabupaten Sukamara
7. Kabupaten Murung Raya
8. Kabupaten Gunung Mas
9. Kabupaten Barito Utara
10. Kabupaten Lamandau
11. Kabupaten Kotawaringin Timur
12. Kabupaten Seruyan
13. Kabupaten Barito Timur
14. Kabupaten Kapuas
15. Kabupaten Barito Selatan

a.n. Pimpinan  
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,  
Komisi Pemberantasan Korupsi



*Dokumen ini ditandatangani secara digital*

Didik Agung Widjanarko